BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

5.1 Prosedur Pembayaran Gaji

Sebagaimana dimaklumi besama bahwa dalam rangka mewujudkan otonomi di bidang administrasi pengelolaan gaji daerah, maka terhitung muali tanggal 1 April 1999 pemerintah pusaat telah menyerahkan kewenangan administrasi pengelolaan gaji daerah kepada pemerintah daerah Prop./Kab./Kota.

Oleh karena itu gaji daerah dilakukan melalui prosedur-prosedur yang ditetapkan.

5.2 Surat Permintaan Pembayaran (SKPP)

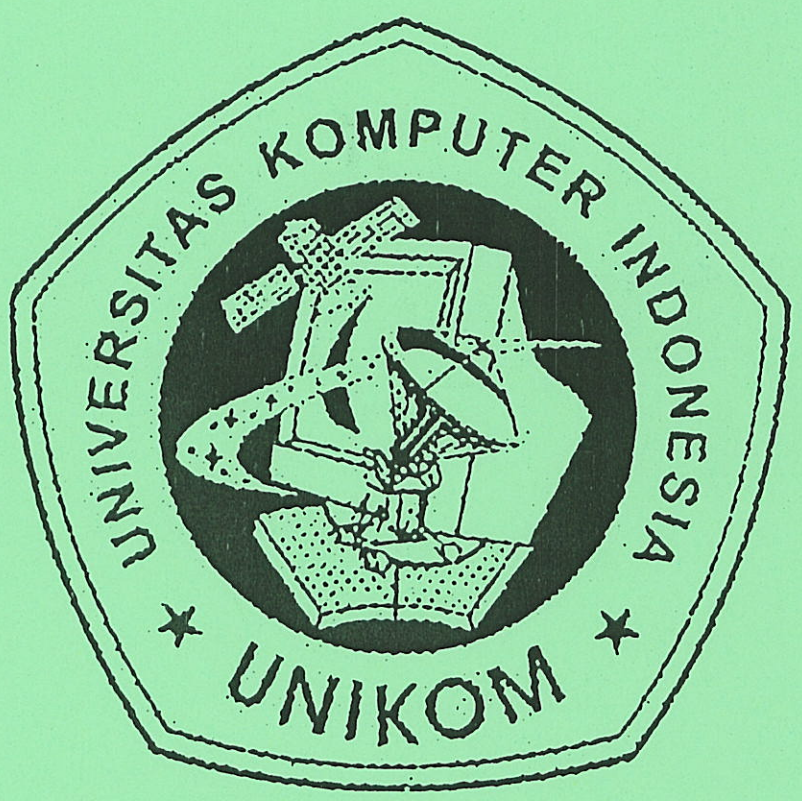
Prosedur pengajuan SPP gaji dan tunjangan dilakukan oleh seluruh Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya. Kemudian SPP ini diteruskan kepada Kepala Bagian/ Sub. Bagian yang akan memeriksa dan mencatat kedalam buku permintaan/ penyelesaian SPP. Setelah semuanya selesaai dan telah dilaksanakan oleh bagian pelaksana, barulah langkah selanjutnya dibuat konsep penerbitan dan pencaairan SPMU.

5.3 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU)

Prosedur penerbitan dan pencaaairan SPMU dilakukan oleh bagian Belanja Pegawai apabila akan melaksanakan pembayaran gaji kecabang dinas yang ada di kab. dan daerah lainnya.

5.4 Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)

Prosedur penerbitan SKPP dilakukan Apabila seorang pegawai negeri mencapai masa pensiun,meninggal dunia dan pegawai yang pindah tugas. SKPP diterbitkan supaya tidak terjadi pembayaran ganda pada instansi yang berlaninan. SKPP diterbitkan setelah SPPT diterima.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM